

**Analisis pencarian kerja di kalangan tenaga kerja terdidik di kota Surakarta
tahun 2003**

(Studi Kasus di kecamatan Jebres)

Fadhilah Rahmawati

F0199036

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu tema pembangunan sejak Pelita I, terutama tentang relevansinya. Relevansi pendidikan ini dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam setiap Pelita tema pendidikan selalu ada karena pendidikan sudah melekat di dalam pembangunan nasional. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena, pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan.

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka masyarakat masih bersedia melakukan investasi pada pendidikan tinggi meskipun tingkat hasil balik (return) tidak lagi sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dimengerti karena

masyarakat menganggap dengan pendidikan yang lebih tinggi (universitas), mereka akan lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan dan dengan pendapatan yang lebih besar.

Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan ini dikenal dengan konsep "*Link and Match*" (Ace Suryadi, 1995:63). *Link* dapat diterjemahkan dengan keterkaitan antara program-program pendidikan dengan kebutuhan pasar. Yang dimaksud dengan pasar di sini adalah "*Educational Constituency*" (Ace Suryadi, 1995), yaitu berbagai pihak yang memakai dan menikmati jasa yang berkepentingan dengan sistem pendidikan. Berbagai pihak dalam *Educational Constituency* tersebut meliputi murid, guru, administrator, masyarakat sekitar, pemerintah, dan sistem ipoleksosbud. Jadi program-program pendidikan secara fungsional dapat melayani berbagai pihak yang berkepentingan dengan sistem pendidikan.

Match dapat diterjemahkan sebagai kesepadanan. Hal ini berarti program pendidikan yang sudah terkait dengan berbagai kepentingan tersebut harus dipersisikan dengan jumlah, tingkatan, mutu atau nilai yang dituntut atau dipersyaratkan oleh, termasuk perubahan kepentingan yang akan selalu terjadi, oleh konstituen pendidikan tersebut (Ace Suryadi, 1995).

Kebijakan *link and match* ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan sumber daya manusia dengan sistem pendidikan. Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem pendidikan dengan struktur lapangan kerja maka semakin efisienlah sistem pendidikan yang ada.

Karena dalam pengalokasian sumber daya manusia akan sesuai dan mampu diserap oleh lapangan kerja.

Dalam kenyataannya pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yaitu, tidak atau belum mampu menghasilkan lulusan seperti yang diharapkan. Lulusan perguruan tinggi tidak otomatis tersedap oleh lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan terjadinya pengangguran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik ini yaitu, *pertama* adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi dari permintaan. *Kedua*, kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering tertutup. *Ketiga*, perguruan tinggi sebagai proses untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang siap pakai belum berfungsi sebagaimana mestinya. *Keempat*, adanya perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri..

1. Penawaran lebih besar daripada permintaan tenaga kerja (supply > demand).

Pada saat tingkat kemakmuran masyarakat tinggi, menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja dapat menurunkan terhadap partisipasi masyarakat untuk masuk dalam dunia kerja. Banyak masyarakat yang kemudian menarik diri dari pasar kerja. Kondisi ini tidak terlalu buruk bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, karena mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi, lain halnya bagi masyarakat dengan kemakmuran yang rendah. Menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan, karena mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja. Keadaan ini dapat terjadi dalam pasar kerja yang bersifat monopoli dimana permintaan terhadap

tenaga kerja sedikit sedangkan penawaran tenaga kerja sangat banyak (Suroto,1992).

Bertambahnya penawaran tenaga kerja yang tidak dapat tertampung dalam pasar kerja semakin buruk apabila tenaga kerja tersebut berasal dari tenaga kerja yang terdidik. Melonjaknya penawaran tenaga kerja terdidik tersebut juga tidak terlepas dari *pertama*, kebijakan pemerintah yang melakukan pembangunan terhadap pendidikan dasar yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Kapasitas di semua jenjang pendidikan rendah, menengah dan tinggi terus saja membesar dalam menghasilkan tenaga terdidik. Data statistik menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah peserta didik pada Sekolah Dasar. Pada Pelita I jumlah peserta didik yang terdaftar meningkat dari 13 juta menjadi 29,3 juta pada tahun 1993/1994. pada jenjang SLTP jumlah peserta didik naik dari 1,5 juta pada awal Pelita I menjadi 6 juta pada akhir Pelita V. Jenjang berikutnya yaitu SLTA, dalam jenjang pendidikan ini juga terjadi kenaikan dalam jumlah siswanya. Pada awal Pelita I sebesar 0,7 juta kemudian meningkat menjadi 4,1 juta. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan tinggi pada tahun 1968 tercatat 156.000 dan meningkat menjadi hampir 14 kali lipatnya yaitu sebesar 2,1 juta pada akhir Pelita V (Wardiman Djojonegoro, 1995).

Pada saat yang bersamaan ekspor minyak tidak lagi menjadi andalan, karena harga minyak terus menerus merosot sehingga pertumbuhan ekonomi melorot dan kapasitas penyerapan kerja menciut. Akibat yang lebih jauh lagi muncul fenomena pengangguran terdidik (*educated unemployment*) dan bahkan

mismatch menjelang akhir dekade 80 an. Terjadinya *mismatch* ini karena keahlian yang diperoleh dari program-program pendidikan tidak sesuai dengan jabatan atau kualifikasi yang dituntut dunia industri. Oleh karena itu muncullah pengangguran tenaga kerja terdidik (Ace Suryadi, 1996 : 16).

Kedua, adanya kelesuan dalam bidang ekonomi terutama setelah terjadinya krisis ekonomi. Persediaan tenaga kerja terdidik yang besar dapat menguntungkan apabila tenaga kerja tersebut di dayagunakan secara efisien di dalam suatu sistem produksi. Namun dalam kenyataan yang ada tenaga kerja terdidik tersebut tidak dapat didayagunakan secara optimal. Dalam tabel 1.1 dapat dilihat jumlah pencari kerja terdaftar, lowongan terdaftar dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Indonesia menurut jenis kelamin dari tahun 1995-2000.

Tabel 1.1. Pencari kerja terdaftar, lowongan terdaftar dan penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Indonesia menurut jeniskelamin tahun 1995-2000

Tahun	Pencari kerja terdaftar		Lowongan kerja Terdaftar		Penempatan/pemenuhan tenaga kerja	
	Laki laki	perempuan	Laki laki	Perempuan	Laki laki	perempuan
1995	681.697	516.854	238.592	223.665	212.624	185.676
1996	794.881	702.278	296.832	332.632	254.456	272.792
1997	822.897	719.625	272.001	321.152	229.203	263.502
1998	623.525	617.037	262.053	299.556	222.214	262.964
1999	611.337	580.413	215.452	259.808	184.812	210.402
2000	488.993	486.222	162.058	226.000	137.448	183.310

Sumber : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Badan Pusat Statistik tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa antara tahun 1995 sampai 1997 jumlah pencari kerja terdaftar mengalami kenaikan. Karena, antara tahun 1995 sampai 1997 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yaitu pada tahun 1995 sebesar 8,21%, tahun 1996 7,82%, tahun 1997 sebagai awal

terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan ekonomi kita sebesar 4,7% dan keadaan ini terus memburuk samapi tahun 1998 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai titik -13,13% (Statistik Indonesia tahun 1995, 1996, 1997).

Hal ini tentu saja membawa dampak pada kegiatan perekonomian. Banyak industri yang terpaksa harus gulung tikar atau tetap berproduksi dengan melakukan efisiensi terhadap jumlah karyawan sehingga banyak tenaga kerja yang harus keluar dari pekerjaannya. Pada saat itu pengangguran melonjak tinggi sehingga meningkatkan jumlah pencari kerja.

Dalam tabel 1.1 juga dapat dilihat, pada tahun 1999 dan 2000 terdapat penurunan terhadap jumlah pencari kerja. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1999 dan 2000 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai membaik yaitu dari 0,85 % menjadi 4,77 % (Statistik Indonesia tahun 1999 dan 2000). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut dapat membantu dalam usaha memulihkan kembali perekonomian sehingga iklim usaha juga semakin baik. Banyak perusahaan mulai membangun kembali industrinya. Sehingga, semakin meningkatkan dalam permintaan terhadap tenaga kerja. Jumlah pencari kerjapun semakin menurun karena sebagian dari mereka telah terserap dalam pasar kerja.

Pencari kerja terdaftar menurut jenis kelamin laki-laki masih lebih besar jumlahnya daripada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin masih berpengaruh terhadap pencarian kerja. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih mempunyai pola pikir tradisional beranggapan bahwa laki-laki merupakan tulang punggung bagi keluarga. Oleh

karena itu, laki-laki sudah seharusnya bekerja untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan, perempuan hanya dianggap membantu dan seolah-olah tidak diwajibkan untuk bekerja. Adanya kecenderungan dari cara berfikir seperti inilah yang menyebabkan pencari kerja laki-laki lebih besar jumlahnya daripada perempuan. Walaupun ada sebagian dari masyarakat Indonesia yang sudah berpikir modern dan tidak mempermasalahkan adanya perbedaan jenis kelamin dalam mempengaruhi pencarian pekerjaan.

2. Kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering bersifat tertutup.

Kebijakan rekrutmen yang sering bersifat tertutup ini merupakan manifestasi dari KKN. Dari keseluruhan angka yang tertera pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penempatan tenaga kerja hanya 1/3 dari seluruh jumlah pencari kerja yang terdaftar, sedangkan sisanya yang tidak dapat tertampung. Akibatnya, para penganggur bisa terpolarisasi berdasarkan pengalaman dalam mencari pekerjaan. Menurut Badeni (2002), dalam mencari pekerjaan tenaga kerja dapat menggunakan bermacam-macam media informasi seperti radio, koran, pendaftaran ke Departemen Tenaga Kerja dan media lain (teman atau famili yang sudah bekerja lebih dahulu di perusahaan yang dilamar). Dalam penelitian yang dilakukannya, Badeni (2002) menemukan bahwa 61,6% responden memilih media lain yaitu informasi yang berasal dari teman atau famili yang sudah bekerja lebih dahulu di perusahaan yang dilamar. Responden yang memilih menggunakan media koran 21,3%, sedangkan yang mendaftarkan ke Departemen Tenaga Kerja sebanyak 13,2%. Radio merupakan media yang paling sedikit dipilih oleh responden yaitu hanya 3,9%.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa *pertama*, media masa baik koran maupun radio belum efektif dalam membantu penyebaran informasi tenaga kerja. Hal ini mungkin berhubungan dengan akses masyarakat yang terbatas. Atau, budaya baca masyarakat yang rendah. *Kedua*, perusahaan yang ada belum sepenuhnya menggunakan media masa dalam penyaringan tenaga kerja. *Ketiga*, Departemen Tenaga Kerja belum difungsikan secara optimal untuk mengakses informasi lapangan kerja. *Keempat*, sebagian besar responden menggunakan media lain yaitu teman atau famili yang sudah lebih dahulu di perusahaan yang dilamar. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan tenaga kerja banyak yang dilakukan secara tertutup.

3. Perguruan tinggi belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Perguruan tinggi sebagai proses untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang siap pakai belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pendidikan secara menyeluruh menyangkut dan terkait dalam segala aspek manusia. Dalam proses pembelajaran Perguruan Tinggi (sebagai jenjang pendidikan tinggi) melibatkan antara dosen dengan mahasiswa. Keterlibatan tersebut dapat berjalan dengan serasi apabila di antara keduanya tercipta hubungan secara profesional. Sebagai seorang dosen harus mampu bertindak sebagai nara sumber, yaitu penyimpan, pengolah dan penyaji pesan sedangkan sebagai mahasiswa harus mampu menjalankan seluruh kegiatan akademiknya dengan baik (Maman Rachman, 2000).

Sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengembangkan 3 aspek kompetensi yaitu *pertama*,

kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian ini dapat diwujudkan oleh dosen yang mempunyai watak pancasila. *Kedua*, kompetensi profesional, dalam hal ini dosen adalah seorang yang berhasil menciptakan, mengelola dan menilai pembelajaran secara optimal dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kompetensi ketiga adalah kemasyarakatan, dosen sebagai warga masyarakat seharusnya dapat diterima oleh lingkungannya dalam rangka mendinamiskan dan memajukan kehidupan masyarakat. Apabila ketiga kompetensi tersebut dapat dilakukan oleh seorang dosen, kemudian ditularkan kepada mahasiswa, maka dapat diharapkan bahwa mahasiswa akan menjadi lulusan yang baik.

Sebagai pembelajar, mahasiswa harus mampu mengikuti semua kegiatan akademik yang ada. Kegiatan akademik tersebut meliputi berbagai macam program seperti perkuliahan dengan sistem tatap muka, seminar, praktikum, kerja lapangan. Dalam menjalankan kegiatan akademik yang diselenggarakan dengan sistem SKS (sistem kredit semester) tidak selalu dalam bentuk tatap muka di dalam kelas saja melainkan berupa pemberian tugas secara terstruktur maupun secara mandiri. Hal tersebut makin menuntut mahasiswa yang mandiri, kritis dan kreatif, serta ekspresif. Keempat sifat tersebut dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pencarian kerja, karena suatu perusahaan akan memerlukan sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi (Zahra Alwi, 2000:306).

Kurikulum yang ada sekarang ini dianggap belum mampu dalam mempersiapkan peserta didik terutama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Materi kurikulum tersebut tidak

berfokus pada fondasi keilmuan, sehingga dimungkinkan tidak terciptanya sistem pembelajaran secara optimal. Disamping itu, tujuan dari kurikulum cenderung dinilai kurang jelas arahnya. Hal tersebut dapat dilihat masih terdapatnya beberapa kompetensi yang diajarkan yang sesungguhnya bukan merupakan kompetensi dasar.

Adanya tuntutan dari kurikulum yang terlalu tinggi tidak dapat dicapai oleh peserta didik, sehingga hanya sebagian dari peserta didik yang memiliki kompetensi dasarlah yang mampu untuk memenuhi kurikulum tersebut.

Terdapat kecenderungan bahwa tujuan sistem pendidikan sekarang ini masih bersifat dualisme, yaitu mempersiapkan lulusan untuk terjun langsung ke masyarakat dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Djamil dalam Sadiyo, 2001).

3. Perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri

Ace Suryadi (1996) menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran tenaga kerja terdidik sebagai akibat dari adanya perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri. *Pertama*, industri-industri modern yang berbasis kapital dengan orientasi pada produktivitas terbukti tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja terdidik. Hal ini dapat dilihat bahwa 60 % dari PDB Indonesia yang mencapai di atas 400 triliun rupiah hanya didukung oleh industri atau lapangan usaha yang berjumlah tidak lebih dari 0,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar industri menggunakan teknologi padat modal, sehingga tenaga kerja digantikan

oleh tenaga mesin. *Kedua*, adanya pengalaman dari beberapa negara, khususnya negara-negara maju yang tergabung dalam organisasi yang disebut OECD, seperti Belgia pada tahun 1960-1968 tingkat pengangguran di negara ini sebesar 2,3 % sedangkan pada tahun 1991 mencapai 7,8 %. Pada tahun 1960-1968 tingkat pengangguran di negara Perancis 1,7 % dan pada tahun 1991 sebesar 9,5 %. Sedangkan untuk negara Jerman pada tahun 1960-1968 hanya sebesar 0,7 % dan pada tahun 1991 sebesar 4,6 % (OECD, Main Economic Indicator, 1992). Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam pengangguran tenaga kerja terdidik akibat dari proses perubahan dari kegiatan ekonomi subsisten ke sektor-sektor remuneratif. Perubahan tersebut membawa dampak dalam peningkatan pengangguran tenaga kerja terdidik karena pekerja dari sektor subsisten belum siap untuk memasuki sektor modern yang menuntut para pekerja untuk mempunyai kualitas yang tinggi.

Pencari kerja merupakan masalah dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Karena, pertumbuhan angkatan kerja jauh melebihi pertumbuhan kesempatan kerja, sehingga pencari kerja masih berebut untuk memperoleh tawaran pekerjaan. Akibatnya probabilitas menemukan pekerjaan rendah, periode mencari kerja tinggi serta biaya mencari kerja bertambah.

Sedangkan yang dimasukkan ke dalam kategori mencari pekerjaan adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan/mencari pekerjaan termasuk di dalamnya mereka yang belum pernah bekerja dan mereka yang sudah pernah bekerja, tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan (Indah Murniati, 2003:42).

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan kegiatan mencari pekerjaan didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan lulusan sekolah menengah tingkat atas umum. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 yang menunjukkan jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mencari pekerjaan menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Tabel 1.2 Penduduk Berumur 10 Tahun keatas Yang Mencari pekerjaan Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 1995-2000

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Mencari Pekerjaan					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tidak / belum pernah sekolah	176.869	42.707	28.810	33.123	31.962	29.010
Tidak/belum tamat SD	673.821	191.887	208.723	224.207	246.538	192.232
Sekolah Dasar	1.692.532	931.647	812.618	911.782	1.151.252	1.216.976
SMTp Umum	948.376	704.301	653.982	869.631	1.037.836	1.367.892
SMTp Kejuruan	72.539	75.321	86.758	114.473	121.642	-
SMTA Umum	1.556.620	1.363.380	1.404.490	1.626.410	1.891.962	1.894.986
SMTA Kejuruan	725.841	700.822	701.692	853.329	994.254	651.369
Diploma I/II	46.220	46.679	37.676	47.380	90.230	1 84.690
Akademi/Diploma III	116.970	112.131	104.054	128.037	153.696	-
Universitas	241.413	238.894	236.352	254.111	310.947	276.076
Jumlah	6.251.201	4.407.769	4.275.155	5.062.483	6.030.319	5.813.231

Catatan : Untuk tahun 1998,1999, dan 2000 berdasarkan penduduk yang berumur 15 tahun keatas.

Sumber : Badan Pusat statistik tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Adanya isu pengangguran yang telah muncul sejak dasawarsa 1980-an tentang munculnya fenomena pengangguran tenaga kerja terdidik sebagai akibat dari kelesuan perekonomian sehingga, tidak mampu dalam menyerap tenaga kerja yang ada ternyata sampai sekarang masih tetap menjadi masalah pembangunan. Masyarakat nampaknya terpaksa menerima situasi pengangguran tenaga kerja terdidik ini sebagai biaya sosial yang harus mereka tanggung. Khususnya untuk masyarakat lulusan pendidikan menengah karena sudah terjebak dalam situasi yang mundur adalah tidak mungkin dan harus maju (*point of no return*) sehingga menganggur kemudian dengan harapan

yang lebih baik barangkali masih lebih baik daripada menganggur sekarang tanpa harapan dengan cara memasuki bangku perguruan tinggi. Jika situasi seperti ini terus berkembang maka tingkat pengangguran terdidik, terutama pendidikan tinggi, akan semakin besar karena minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi tidak pernah surut.

Berdasarkan kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tersebut kiranya sangat perlu untuk mengadakan penelitian mengenai perilaku pencarian kerja di kalangan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Penelitian ini berusaha membuka tabir itu dengan memilih Kecamatan Jebres kota Surakarta sebagai suatu studi kasus. Area ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan berikut. Jumlah penduduk yang paling banyak di kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 162.383, kecamatan Jebres sebesar 136.866. Kecamatan Laweyan 107.200, Pasar Kliwon 85.375. dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan Serengan yaitu sebesar 61.756.

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk Menurut Pendidikan (umur 5 tahun keatas) Tiap Kecamatan Kota Surakarta Tahun 2001 (dalam persen)

Jenjang Pendidikan	Laweyan	Serengan	Pasar Kliwon	Jebres	Banjarsari
Tidak Sekolah	4.57	3.79	3.49	9.64	6.36
Belum tamat SD	11.36	10.21	17.59	15.17	13.17
Tidak tamat SD	10.18	8.96	10.3	11.72	13.91
Tamat SD	22.08	26.97	18.97	22.13	23.18
Tamat SLTP	21.80	24.0	20.8	20.48	19.12
Tamat SLTA	23.63	17.81	22.45	16.01	17.44
Tamat akademi /PT	6.38	8.26	6.41	4.75	4.60

Sumber : Badan pusat Statistik kota Surakarta tahun 2001

Dalam tabel 1.3 dapat dilihat banyaknya penduduk menurut pendidikan (umur 5 tahun ke atas) tiap Kecamatan Kota Surakarta tahun 2001. Jumlah

penduduk di kecamatan Jebres yang tamat SLTA sebesar 16,01% dan penduduk yang tamat akademi/PT sebesar 4,75%. Walaupun angka ini paling kecil bila dibandingkan dengan kecamatan yang lain, ia tetap dipilih karena penulis berdomisili di ini. Hal ini dapat mempermudah untuk memperoleh akses penelitian dan memperkecil biaya penelitian.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik para pencari kerja di Kecamatan Jebres ?.
2. Adakah pengaruh antara variabel jenis kelamin, umur, pendidikan, asal SLTA, pendapatan rumah tangga dan jumlah pekerjaan terhadap lama mencari kerja ?.
3. Bagaimanakah proses pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan ?.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik para pencari kerja di Kecamatan Jebres.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel jenis kelamin, umur, pendidikan, asal SLTA, pendapatan rumah tangga dan jumlah pekerjaan terhadap lama mencari kerja ?.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang ketenagakerjaan di Surakarta.
2. Dapat memperkaya khasanah penelitian atau kepustakaan yang telah ada.

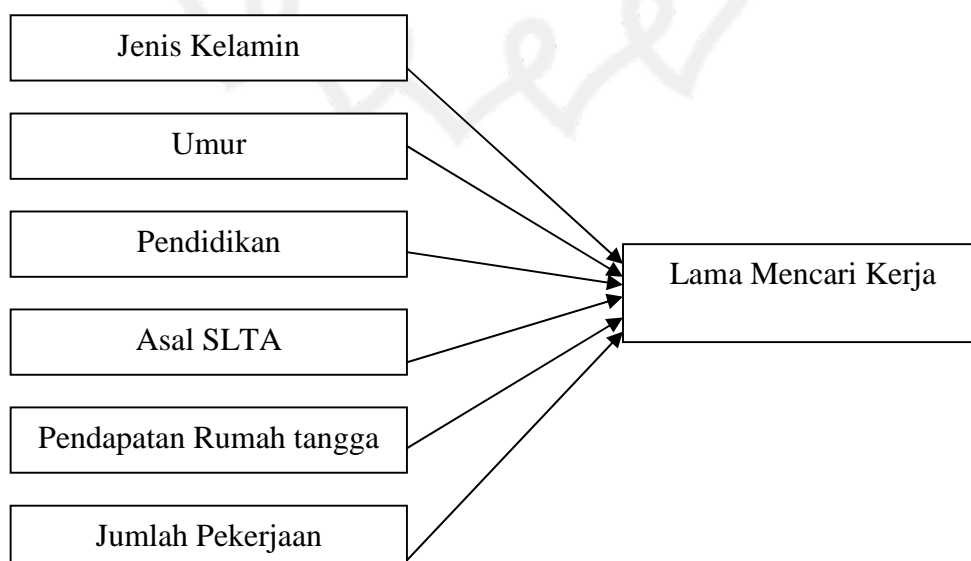
3. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

E. Hipotesis

Untuk mengetahui perilaku pencarian kerja di kalangan tenaga kerja terdidik di Surakarta diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga terdapat perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan terhadap lama mencari kerja
2. Diduga umur berpengaruh positif terhadap lama mencari kerja
3. Diduga pendidikan berpengaruh positif terhadap lama mencari kerja
4. Diduga terdapat perbedaan antara asal SLTA umum (SMU) dan asal SLTA kejuruan (SMK) terhadap lama mencari kerja
5. Diduga pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap lama mencari kerja
6. Diduga terdapat perbedaan jumlah pekerjaan terhadap lama mencari kerja

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dapat dibuat suatu kerangka pemikiran mengenai perilaku pencarian kerja di kalangan tenaga kerja terdidik di Surakarta. Dalam kerangka pemikiran di atas menunjukkan adanya pengaruh antara variabel-variabel independen yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, asal SLTA, pendapatan rumah tangga, dan jumlah pekerjaan terhadap variabel dependen yaitu lama mencari kerja.

Pola pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen akan dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat perbedaan antara pencari kerja laki-laki dan perempuan terhadap lama mencari kerja. *Kedua*, umur mempunyai pengaruh positif terhadap lama mencari kerja. *Ketiga*, pendidikan berpengaruh positif terhadap lama mencari kerja. *Keempat*, terdapat perbedaan asal SLTA antara pencari kerja yang berasal dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dan pencari kerja yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Kelima*, pendapatan rumah tangga berpengaruh positif terhadap lama mencari kerja. *Keenam*, terdapat perbedaan dalam jumlah pekerjaan antara pencari kerja yang belum bekerja dan bekerja satu kali dengan pencari kerja yang bekerja lebih dari satu kali.

G. Metodologi Penelitian

1. Populasi/Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini populasi meliputi penduduk di Kecamatan Jebres yang telah tamat SLTA. Berdasarkan data tahun 2000, jumlah populasi untuk penelitian ini sebesar 18.185 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini sampel meliputi penduduk yang telah tamat SLTA di beberapa kelurahan di Kecamatan Jebres. Ukuran dari sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dicari dengan menggunakan rumus (Alimuddin Tuwu, 1993: 161) :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

n = ukuran dari sampel

N = banyaknya populasi

e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan sampel yang masih dapat ditolelir

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

a. Tahap Pertama

Tahap ini dimulai dengan menentukan wilayah kecamatan yaitu kecamatan Jebres. Selanjutnya dengan menggunakan *cluster sampling*, yaitu data jumlah populasi di kecamatan Jebres yang telah tamat SLTA di kecamatan Jebres dikelompokkan menjadi beberapa cluster berdasarkan kelurahannya masing-masing. Dalam penelitian ini terdapat 11 *cluster* karena di kecamatan

Jebres terdapat 11 kelurahan. Dari 11 kelurahan ini dipilih secara acak untuk menentukan dua kelurahan yang akan dipilih.

b. Tahap Kedua

Membuat kerangka sampel untuk dua kelurahan terpilih, kemudian memberi nomor 1 sampai 11 pada masing-masing kelurahan. Secara acak dipilih 2 kelurahan sebagai kelurahan terpilih yang mewakili dari 11 kelurahan yang ada di Kecamatan Jebres.

b. Tahap Ketiga

Setelah memperoleh 2 kelurahan sebagai kelurahan terpilih maka sampel diambil berdasarkan proporsi dari masing-masing kelurahan terpilih terhadap jumlah keseluruhan dari kelurahan yang terpilih.

c. Tahap Keempat

Dalam tahap ini anggota sampel diambil secara acak sistematis yaitu dengan cara memberikan nomor urut pada semua anggota dari masing-masing kelurahan yang terpilih. Kemudian menentukan interval (selang pengambilan anggota sampel berikutnya) dengan cara membagi jumlah populasi terhadap jumlah sampel yang diambil dari kedua kelurahan terpilih (N/n). Pengambilan sampel dimulai dari nomor urut yang pertama dan selanjutnya disesuaikan berdasarkan intervalnya sampai pada jumlah sampel yang terakhir menurut proporsi dari masing-masing kelurahan.

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berasal dari 2 sumber yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh dengan mendatangi masing-masing responden kemudian melakukan wawancara langsung kepada responden untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Cara yang kedua dengan menyebarkan kuisioner, berupa daftar pertanyaan sehubungan dengan informasi yang diinginkan, yang akan diisi langsung oleh responden.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari terbitan/laporansuatu lembaga. Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari Badan Pusat Statistik Jakarta, Badan pusat Statistik Kota Surakarta, dan Monografi Kecamatan Jebres.

5. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel lama mencari kerja merupakan variabel dependen (variabel bebas).
Lama mencari kerja yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan bagi pencari kerja untuk menemukan pekerjaan
2. Variabel jenis kelamin merupakan variabel independen yang menyatakan jenis kelamin dari pencari kerja. Pengukuran variabel jenis kelamin ini menggunakan variabel dummy dimana untuk $D=1$ menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan $D=0$ menunjukkan jenis kelamin perempuan.
3. Variabel umur merupakan variabel independen yang menyatakan umur pencari kerja.

4. Variabel pendidikan merupakan variabel independen yang menggambarkan berbagai tingkat pendidikan yang dicapai oleh pencari kerja dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran dari variabel pendidikan ini adalah waktu yang ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Variabel asal SLTA merupakan variabel independen yang menyatakan asal SLTA dari pencari kerja. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy dimana untuk $D=1$ menunjukkan asal SLTA dari Sekolah Menengah Umum (SMU), sedangkan untuk $D=0$ menunjukkan asal SLTA dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Variabel pendapatan rumah tangga merupakan variabel independen yang menyatakan jumlah seluruh penghasilan atau penerimaan yang diperoleh baik yang berupa gaji/upah maupun pendapatan dari usaha dan pendapatan lainnya selama satu bulan dari seluruh anggota rumah tangga.
7. Variabel jumlah pekerjaan merupakan variabel independen yang menyatakan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh pencari kerja. Pengukuran variabel jumlah pekerjaan ini menggunakan variabel dummy dimana untuk $D=1$ menunjukkan pencari kerja yang belum bekerja dan bekerja satu kali, sedangkan $D=0$ menunjukkan pencari kerja yang bekerja lebih dari satu kali.

6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan variabel dummy. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis karakteristik pencari kerja dan proses mencari kerja terhadap lama

mencari kerja. Dalam analisis deskriptif ini akan dijelaskan gambaran mengenai karakteristik pencari kerja dan proses pencarian kerja yang berpengaruh terhadap lama mencari kerja. Apakah dengan karakteristik pencari kerja dan proses pencarian kerja tertentu akan mempengaruhi terhadap lama mencari kerja.

Analisis yang kedua adalah analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda dengan menggunakan variabel dummy ini bertujuan untuk mencari besarnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tak bebas, pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan. (Damodar Gujarati, 1999:12).

Variabel independen (variabel bebas) adalah jenis kelamin, umur, pendidikan, asal SLTA, pendapatan rumah tangga, dan jumlah pekerjaan. Sedangkan, variabel dependen (variabel terikat) adalah lama mencari kerja. Dalam penelitian ini terdapat variabel dummy atau variabel yang menjelaskan yang bersifat kualitatif dalam analisis regresi yaitu variabel jenis kelamin, variabel asal SLTA dan variabel jumlah pekerjaan. Persamaan regresi linear berganda dengan variabel dummy dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + D_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 D_6 + \mu_1$$

Dimana :

Y = lama mencari kerja, dalam satuan bulan

D₁ = variabel dummy jenis kelamin

D₁ = 1 jika responden laki-laki

D₁ = 0 jika responden perempuan

X_2 = umur, dalam satuan bulan

X_3 = pendidikan (tahun sukses pendidikan), dalam satuan bulan

D_4 = variabel dummy asal SLTA

$D_4 = 1$ jika asal SLTA umum

$D_4 = 0$ jika asal SLTA kejuruan

X_5 = pendapatan rumah tangga, dalam satuan rupiah

D_6 = jumlah pekerjaan

$D_6 = 1$ jika responden belum bekerja dan bekerja satu kali

$D_6 = 0$ jika responden bekerja lebih dari satu kali

β_0 = intersep/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = koefisien

μ_1 = variabel pengganggu

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen di uji secara statistik.

1. Pengujian secara individual (uji t)

Uji t dimaksudkan untuk membuktikan bahwa koefisien regresi suatu model regresi itu secara statistik signifikan atau tidak, dengan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 = \alpha_1 = 0$$

$$H_a = \alpha_1 \neq 0$$

Kriteria pengujiannya adalah jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel berdasarkan suatu level of significance tertentu, berarti H_0 diterima yang artinya variabel independen tadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel berdasarkan level of

significance berarti H_0 ditolak yang artinya variabel tadi berpengaruh secara significance terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian lainnya adalah dengan melihat dan membandingkan tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Apabila diperoleh taraf signifikansi yang tercermin dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan, maka variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel yaitu probabilitas perilaku pencarian kerja, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$$

$$H_0 \neq \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$$

Kriteria pengujianya adalah apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel maka H_0 diterima yang artinya variabel-variabel independen yang digunakan tidak secara keseluruhan dan bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel maka H_0 ditolak yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi tertentu. Selain itu dapat pula menggunakan kriteria dengan melihat probabilitasnya seperti pada uji t. Apabila diperoleh taraf signifikansi yang tercermin dari nilai probabilitas yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan, maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel bebas (independen) dapat menerangkan dengan baik variasi variabel terikatnya (dependen) bisa dilihat nilai R^2 (koefisien determinasi). Dalam perhitungan ini nilai R^2 adalah 0.632. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, umur, pendidikan, asal SLTA, pendapatan rumah tangga, jumlah pekerjaan, dapat menerangkan 63.02 persen variasi variabel lama mencari kerja. Sedangkan sisanya 36.8 persen variasi variabel lama mencari kerja dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model analisis ini.

4. Uji asumsi klasik

1) Uji multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Damodar Gujarati, 1999:157). Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance inflation factor). Jika VIF lebih besar dari 5 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya (Singih Santosa, 2001:357).

2) Autokorelasi

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

a) H_0 tidak ada serial korelasi positif jika :

$d < d_l$: menolak H_0

$d > d_u$: tidak menolak H_0

$d_l \leq d \leq d_u$: pengujian tidak meyakinkan

b) H_0 tidak ada serial korelasi negatif jika :

$d > 4-d_l$: menolak H_0

$d < 4-d_u$: tidak menolak H_0

$4-d_u \leq d \leq 4-d_l$: pengujian tidak meyakinkan

c) H_0 tidak ada serial autokorelasi baik positif maupun negatif jika ;

$d < d_l$: menolak H_0

$d > 4-d_l$: menolak H_0

$d_u < d < 4-d_u$: pengujian tidak meyakinkan

